

**DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENGGELEDAHAN TERSANGKA
TINDAK PIDANA NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA SATUAN RESERSE
NARKOBA POLRES KOTA PAYAKUMBUH**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum*



Oleh :

PUTRIHENDINI
NIM. 2120113069

PEMBIMBING :

- 1. PROF.DR.ISMANSYAH,S.H.,M.H**
- 2. DR.A.IRZAL RIAS S.H.,M.H**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS
VALIDITY SHEET

DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENGGELEDAHAN TERSANGKA TINDAK PIDANA
NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA
SATUAN RESERSE NARKOBA POLRES KOTA PAYAKUMBUH

POLICE DISCRETION IN SEARCHING FOR NARCOTICS CRIME SUSPECTS AS A FORM OF
OVERCOMING NARCOTICS ABUSE IN THE PAYAKUMBUH CITY POLICE DRUG RESEARCH UNIT

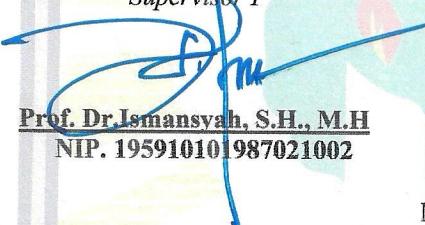
Putri Hendini
2120113069

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Akhir Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas dan dinyatakan LULUS pada tanggal 02 Mei 2025.

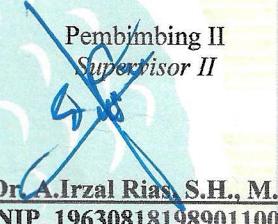
This thesis has been tested and defended in front of the Final Examination Committee of the Master of Law, Faculty of Law, Andalas University and was declared PASSED on May 2, 2025.

Menyetujui
Komisi Pembimbing
Approve
The supervising commission

Pembimbing I
Supervisor I

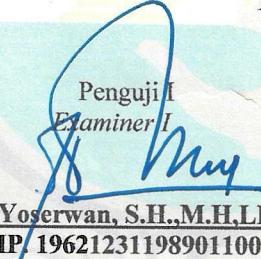

Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H.
NIP. 195910101987021002

Pembimbing II
Supervisor II

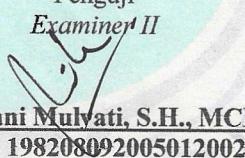

Dr. A.Irzal Rias, S.H., M.H.
NIP. 196308181989011001

Menyetujui
Komisi Pengaji
Approve
The examination commission

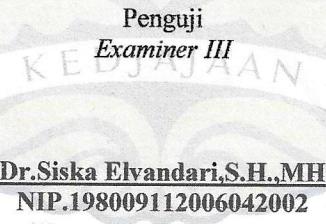
Pengaji I
Examiner I


Dr. Yoserwan, S.H., M.H., LLM
NIP. 196212311989011002

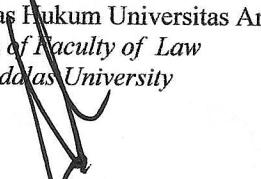
Pengaji
Examiner II


Dr. Nani Mulvati, S.H., MCL
NIP. 198208092005012002

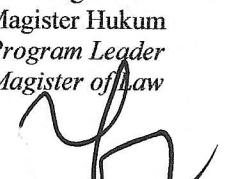
Pengaji
Examiner III


Dr. Siska Elvandari, S.H., MH
NIP. 198009112006042002

Dekan Fakultas Hukum
Fakultas Hukum Universitas Andalas
Dean of Faculty of Law
Andalas University


Prof. Dr. Ferdi, S.H., M.H.
NIP. 196807231993021001

Ketua Program Studi
Magister Hukum
Program Leader
Magister of Law


Dr. Yasniwati, S.H., M.H.
NIP. 197211132005012001

**DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENGGELEDAHAN TERSANGKA TINDAK
PIDANA NARKOTIKA SEBAGAI BENTUK PENANGGULANGAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA SATUAN RESERSE NARKOBA
POLRES KOTA PAYAKUMBUH**

(Putri Hendini, 2120113069, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Andalas, 160 halaman, 2025)

ABSTRAK

Diskresi kepolisian adalah konsep otoritas polisi yang diberikan oleh hukum untuk melakukan tindakan sesuai dengan pertimbangan hati nurani petugas maupun institusi. Jenis penggeledahan yaitu penggeledahan rumah, penggeledahan pakaian dan penggeledahan badan. Tindak pidana narkotika dapat dirumuskan sebagai *crime without victim*, dimana para pelaku juga berperan sebagai korban. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba masih terus menjadi ancaman serius, hal ini diakibatkan oleh terjadinya peningkatan produksi narkoba secara *illegal* dan pendistribusian yang begitu cepat dan meluas dengan tidak lagi mengenal batas antar negara. Rumusan masalah penelitian ini adalah 1) Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan diskresi penggeledahan oleh kepolisian unit satnarkoba Polres Kota Payakumbuh? 2) Apakah pertimbangan dilakukan dikresi kepolisian pada proses penggeledahan tersangka yang dilakukan oleh satnarkoba Polres Kota Payakumbuh? 3) Apa kendala-kendala dan upaya-upaya dilakukan dikresi kepolisian pada proses penggeledahan tersangka yang dilakukan oleh satnarkoba Polres Kota Payakumbuh?. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan dan pelaksanaan diskresi kepolisian satnarkoba Polres Kota Payakumbuh sudah mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada. Kemudian pertimbangan kepolisian dalam melakukan diskresi yaitu atas dasar kemanusiaan, dengan pertimbangan jika tetap dilakukan penggeledahan terhadap tersangka, maka akan berdampak buruk, yang jika dikaitkan dengan teori diskresi kepolisian maka pihak kepolisian memiliki kewenangan tersebut. Selanjutnya dalam pelaksanaan diskresi tersebut pihak kepolisian memiliki kendala, namun pihak kepolisian melakukan upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

Kata kunci : diskresi kepolisian, penggeledahan, tindak pidana narkotika

**POLICE DISCRETION IN SEARCHING FOR NARCOTICS CRIME SUSPECTS AS
A FORM OF OVERCOMING NARCOTICS ABUSE IN THE PAYAKUMBUH CITY
POLICE DRUG RESEARCH UNIT**

**(Putri Hendini, 2120113069, Master of Law, Faculty of Law, Andalas University, 160
pages, 2025)**

ABSTRACT

Police discretion is the concept of police authority granted by law to carry out actions in accordance with the conscience considerations of officers and institutions. Types of searches include house searches, clothing searches and body searches. Narcotics crimes can be formulated as crimes without victims, where the perpetrators also act as victims. Drug abuse and illicit trafficking continues to be a serious threat, this is caused by an increase in illegal drug production and distribution which is so fast and widespread that no longer recognizes borders between countries. The formulation of the research problem is 1) How is the regulation and implementation of police discretion by the Payakumbuh City Police narcotics unit? 2) Is consideration taken by police discretion in the process of searching suspects carried out by the Payakumbuh City Police Narcotics Unit? 3) What are the obstacles and efforts made by the police in the process of searching suspects carried out by the Payakumbuh City Police Narcotics Unit? This type of research is empirical legal research with descriptive research characteristics. Based on this research, it can be concluded that the regulation and implementation of the police discretion of the Payakumbuh City Police narcotics unit has followed existing laws and regulations. Then the police's consideration in exercising discretion is based on humanity, with the consideration that if the suspect is still searched, it will have fatal consequences, which if linked to the theory of police discretion means that the police have this authority. Furthermore, in implementing this discretion, the police have problems, but the police are making efforts to overcome these obstacles.

Key words: police discretion, search, narcotics crime

